



Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Efektivitas Pengawasan DPRD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Dompu)

Lerni^{1*}, M. Ikhwan Mansyuri², Rizky Ramadhan³

^{1,3}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

*Penulis Korespondensi: lernilerni9@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of regional financial management accountability, Local Own-Source Revenue (PAD) management, and the effectiveness of DPRD supervision on the quality of regional government financial statements at the DPRD of Dompu Regency. This study employed a quantitative method with an associative approach. The population consisted of all 30 members of the DPRD of Dompu Regency, and all members were included as the research sample. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the assistance of IBM SPSS Statistics. The data analysis included validity tests, reliability tests, and classical assumption tests, while hypothesis testing was conducted using t-tests and F-tests. The results show that regional financial management accountability has a significant effect on the quality of regional government financial statements, with a t-statistic of 2.709 and a p-value of 0.011. Local Own-Source Revenue (PAD) management also has a significant effect on the quality of regional government financial statements, with a t-statistic of 2.705 and a p-value of 0.011. Furthermore, the effectiveness of DPRD supervision has a significant effect on the quality of regional government financial statements, with a t-statistic of 2.937 and a p-value of 0.007. Simultaneously, regional financial management accountability, PAD management, and the effectiveness of DPRD supervision have a significant effect on the quality of regional government financial statements, with a statistical value of 7.378 and a p-value of 0.001. These findings indicate that improving financial management accountability, optimizing PAD management, and strengthening the effectiveness of DPRD supervision can contribute to improving the quality of regional government financial statements.*

Keywords: *Accountability; DPRD Supervision; Financial Report; Local Finance; PAD Management.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan efektivitas pengawasan DPRD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada DPRD Kabupaten Dompu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Dompu yang berjumlah 30 orang dan seluruhnya dijadikan sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Pengujian data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik, sedangkan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan nilai t-statistic sebesar 2,709 dan p-value sebesar 0,011. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan nilai t-statistic sebesar 2,705 dan p-value sebesar 0,011. Selanjutnya, efektivitas pengawasan DPRD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan nilai t-statistic sebesar 2,937 dan p-value sebesar 0,007. Secara simultan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan PAD, dan efektivitas pengawasan DPRD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan nilai statistik sebesar 7,378 dan p-value sebesar 0,001. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pengelolaan PAD yang baik, serta efektivitas fungsi pengawasan DPRD dapat mendukung terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas.

Kata kunci: Akuntabilitas; Keuangan Daerah; Laporan Keuangan; Manajemen PAD; Pengawasan DPRD.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2018). Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance (Mahmudi, 2019). Menurut Halim dan Kusufi (2018), pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, alat pengawasan, serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah (Mahmudi, 2019). Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas mampu memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Menurut Nordiawan dan Hertianti, (2017) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, serta tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti ketidaksesuaian pencatatan, lemahnya pengawasan, kurang optimalnya pengelolaan pendapatan daerah, serta rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2014). Akuntabilitas publik menunjukkan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Mardiasmo, 2018). Penelitian Siregar, (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Akuntabilitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain akuntabilitas, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Halim, 2014).

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Menurut Yani, (2017) pengelolaan PAD yang optimal dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih transparan serta akuntabel. PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan potensi daerah masing-masing. Pengelolaan PAD yang baik dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, pengelolaan PAD yang kurang optimal dapat menimbulkan ketidakefisienan dan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah efektivitas pengawasan DPRD (Mahsun, 2013). DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Mahmudi, (2019) pengawasan DPRD yang efektif dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan yang efektif akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah otonom memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan daerah yang berkualitas. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pengelolaan PAD, dan pengawasan DPRD. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan PAD, dan efektivitas pengawasan DPRD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Efektivitas Pengawasan DPRD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Dompu)”.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh

aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Mardiasmo, 2018). Menurut Mahmudi, (2019) akuntabilitas publik dalam pemerintahan daerah sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat. UNDP, (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama good governance selain transparansi, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Pemerintah daerah yang akuntabel cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan dapat dipercaya.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020). Menurut Halim dan Kusufi, (2018) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui laporan keuangan yang transparan dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Mahmudi, (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Pramono, (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Bastian, (2014) indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi: (1) Transparansi pengelolaan keuangan, (2) Kepatuhan terhadap peraturan, (3) Ketepatan penyusunan laporan keuangan, (4) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan (5) Keterbukaan informasi publik.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Menurut Yani, (2017) PAD menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam mengelola PAD maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Halim dan Kusufi, (2018) menyatakan bahwa pengelolaan PAD yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih

transparan dan akuntabel. Mahmudi, (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan PAD harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Halim, (2014) indikator pengelolaan PAD meliputi: (1) Perencanaan PAD, (2) Pelaksanaan pemungutan PAD, (3) Pengawasan PAD, (4) Efektivitas pencapaian target PAD, (5) Optimalisasi sumber PAD.

Efektivitas Pengawasan DPRD

Pengawasan DPRD merupakan salah satu fungsi DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD dan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Widodo, (2018) fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat. Mahsun, (2013) menyatakan bahwa pengawasan DPRD yang efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian Arifin, (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mahmudi, (2019) indikator efektivitas pengawasan DPRD meliputi: (1) Pengawasan pelaksanaan APBD, (2) Monitoring program pemerintah daerah, (3) Evaluasi penggunaan anggaran, (4) Tindak lanjut hasil pengawasan, (5) Pencegahan penyimpangan anggaran.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat kemampuan laporan keuangan dalam menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Nordiawan dan Hertianti, (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Menurut Mahmudi, (2019) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan internal, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Indriasari dan Nahartyo, (2018) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal pemerintah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, indikator kualitas laporan keuangan meliputi: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, (4) Dapat dipahami.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Arifin, (2021) menguji pengaruh pengawasan DPRD terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan secara efektif mampu meminimalkan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah daerah. Penelitian ini sangat relevan karena salah satu variabel independen yang digunakan adalah efektivitas pengawasan DPRD. Perbedaannya terletak pada penelitian ini yang menjadikan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen dengan menambahkan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan PAD sebagai faktor yang turut memengaruhi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramono, (2020) bertujuan mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, semakin baik pula kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Penelitian ini relevan karena menggunakan variabel akuntabilitas sebagai salah satu variabel independen yang juga digunakan dalam penelitian ini. Namun demikian, penelitian ini memperluas model penelitian dengan menambahkan variabel pengelolaan PAD dan efektivitas pengawasan DPRD.

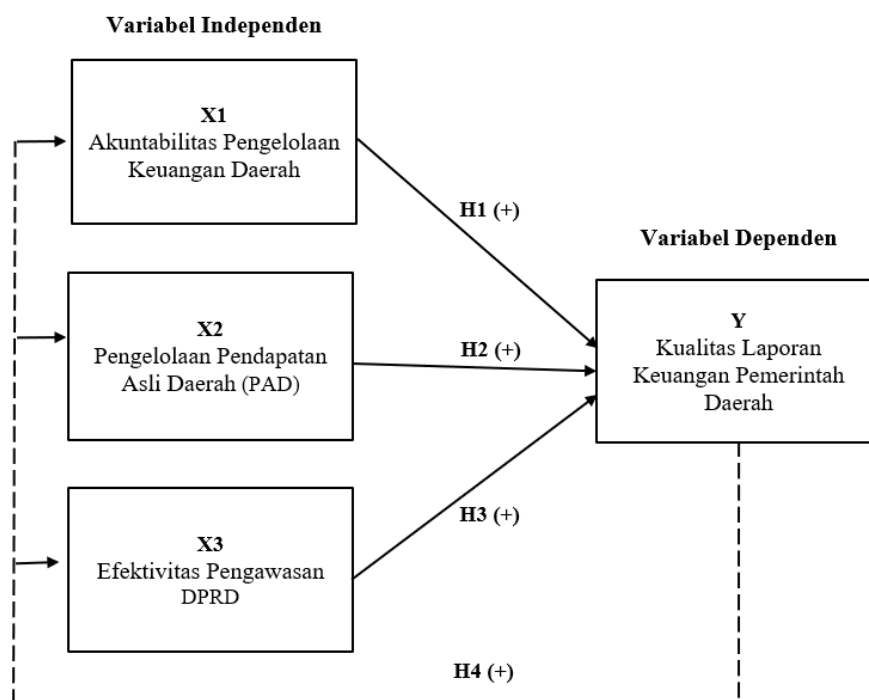
Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo, (2018) mengkaji pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kemampuan aparatur dalam memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun variabel independen yang digunakan berbeda. Penelitian ini menggunakan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian yang dilakukan menambahkan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan efektivitas pengawasan DPRD sebagai faktor yang diduga memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian Siregar, (2017) menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara transparan akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama menjadikan akuntabilitas sebagai variabel utama. Perbedaannya terletak pada penelitian ini yang juga memasukkan pengelolaan PAD dan efektivitas pengawasan DPRD sebagai variabel independen.

Kerangka Berpikir

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan sesuai aturan. Pengelolaan PAD yang optimal akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih baik dan akurat. Efektivitas pengawasan DPRD juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan karena pengawasan yang baik dapat meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1. Kerangka Konseptual.

Hipotesis Penelitian:

H₁: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₂: Pengelolaan PAD Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₃: Efektivitas Pengawasan DPRD Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₄: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan PAD, Dan Efektivitas Pengawasan DPRD Secara Simultan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono, (2019) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan PAD, dan efektivitas pengawasan DPRD terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Juli 2026 dengan responden dari anggota komisi DPRD yang terdiri dari 3 komisi.

Populasi

Menurut Sugiyono, (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dan pihak terkait pada DPRD Kabupaten Dompu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian kepegawaian DPRD Kabupaten Dompu pada bulan Juni 2026, jumlah total anggota DPRD kabupaten Dompu sebanyak 30 orang yang terdiri dari 3 komisi dimana masing-masing komisi berjumlah 10 orang. Oleh karena itu, seluruh anggota populasi akan dijadikan sampel penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan sehingga dapat dianalisis menggunakan metode statistik (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini, jenis data berupa skor jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, (2019) sumber data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau responden tanpa melalui perantara (Sugiyono, 2019). Menurut Arikunto, (2013) data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai atau pihak terkait pada DPRD Kabupaten Dompu. Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas pengawasan DPRD, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Nazir, (2014) penggunaan data primer melalui kuesioner sangat efektif dalam penelitian kuantitatif karena dapat memperoleh data secara langsung sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti dokumen, arsip, laporan, buku, dan jurnal penelitian (Sugiyono, 2019). Menurut Sekaran dan Bougie, (2017) data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat digunakan kembali untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal ilmiah, laporan keuangan pemerintah daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, seperti:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Data sekunder digunakan untuk mendukung teori, memperkuat landasan penelitian, serta membantu peneliti dalam menganalisis hasil penelitian.

Data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, laporan keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari kuesioner, observasi dan dokumentasi.

Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2019).

Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi objek penelitian (Nazir, 2014).

Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Arikunto, 2013).

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Operasional Variabel.

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah	Transparansi, kepatuhan, pelaporan	Likert
Pengelolaan PAD	Pengelolaan pendapatan asli daerah	Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan	Likert
Efektivitas Pengawasan DPRD	Fungsi pengawasan DPRD	Monitoring, evaluasi	Likert
Kualitas Laporan Keuangan	Tingkat kualitas laporan keuangan	Relevan, andal	Likert

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban.

Tabel 2. Skala Likert.

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian (Ghozali, 2018).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dalam penelitian memenuhi syarat statistik sehingga hasil analisis regresi dapat dipercaya dan tidak bias. Dalam penelitian kuantitatif, salah satu yang diujikan adalah pengujian multikolinearitas (Ghozali, 2018). Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Menurut Priyatno, (2016) multikolinearitas dapat menyebabkan hasil regresi menjadi tidak stabil sehingga mempengaruhi ketepatan pengujian hipotesis. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Kriteria yang digunakan menurut Ghozali, (2018):

- a. Nilai Tolerance > 0,10
- b. Nilai VIF < 10

Jika kedua syarat tersebut terpenuhi maka model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas.

Kriteria Pengambilan Keputusan:

- a. Jika Tolerance > 0,10 dan VIF < 10 → tidak terjadi multikolinearitas
- b. Jika Tolerance < 0,10 dan VIF > 10 → terjadi multikolinearitas

Analisis Regresi Linear Berganda

Adapun Persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + e$$

Keterangan:

- a. Y = Kualitas laporan keuangan
- b. X1 = Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- c. X2 = Pengelolaan PAD

- d. X_3 = Efektivitas pengawasan DPRD
- e. a = Konstanta
- f. b = Koefisien regresi
- g. e = Error

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji F (Simultan)

Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Alat Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. DPRD Kabupaten Dompu merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki kedudukan dan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya melalui pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting yang perlu dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah mencakup berbagai proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan daerah. Dalam proses tersebut, DPRD memiliki peran melalui fungsi anggaran dan pengawasan terhadap kebijakan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DPRD Kabupaten Dompu menjadi lokasi yang relevan untuk penelitian ini karena anggota DPRD memiliki keterlibatan dalam pembahasan dan persetujuan APBD, pembahasan kebijakan keuangan daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, DPRD juga memiliki kepentingan terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini berfokus pada pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan efektivitas pengawasan DPRD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, anggota DPRD Kabupaten Dompu dipandang relevan sebagai responden karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam proses penganggaran serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Analisis Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian (Ghozali, 2018). Adapun hasil analisis korelasi disajikan pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Analisis Korelasi.

Variabel	X ₁	X ₂	X ₃	Y
X1.1	0.890			
X1.2	0.930			
X1.3	0.887			
X1.4	0.895			
X1.5	0.908			
X1.6	0.874			
X1.7	0.835			
X1.8	0.943			
X1.9	0.846			
X1.10	0.914			
X2.1		0.812		
X2.2		0.922		
X2.3		0.895		
X2.4		0.922		
X2.5		0.905		
X2.6		0.841		
X2.7		0.945		
X2.8		0.888		
X2.9		0.844		
X2.10		0.802		
X3.1			0.819	
X3.2			0.907	
X3.3			0.881	
X3.4			0.921	
X3.5			0.822	
X3.6			0.872	
X3.7			0.911	
X3.8			0.897	
X3.9			0.831	
X3.10			0.866	
Y1				0.942
Y2				0.904

Y3	0.898
Y4	0.907
Y5	0.837
Y6	0.880
Y7	0.843
Y8	0.845
Y9	0.829
Y10	0.874

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics

Keterangan :

X₁ : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

X₂ : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₃ : Efektivitas Pengawasan DPRD

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil temuan pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X₁), Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X₂), Efektivitas Pengawasan DPRD (X₃) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) semua valid dalam setiap pernyataan. Menurut Ghozali dalam Rifai (2015) menyatakan bahwa skala pengukuran *cross loading* sebesar 0,7 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat *convergent validity*. Data di atas menunjukkan bahwa semua indikator variabel nilai *outer loading*-nya di atas 0,7, sehingga dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengukur nilai *Cronbach's Alpha* dimana ketentuan nilai dari *Cronbach's Alpha* yang reliabel (baik) yaitu $\alpha > 0.7$ (vinzi, Trinchera & Amato, 2010). Adapun ketentuan nilainya sebagai berikut :

- a. Nilai $\alpha \geq 0,70 \rightarrow$ reliabel (baik)
- b. Nilai $0,60 \leq \alpha < 0,70 \rightarrow$ cukup reliabel
- c. Nilai $\alpha < 0,60 \rightarrow$ tidak reliabel

Adapun hasil analisis uji reliabilitas disajikan pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Analisis Uji Reliabilitas.

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.971	Reliabel
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.966	Reliabel
Efektivitas Pengawasan DPRD	0.965	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.965	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics

Berdasarkan data pada table 4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variable Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) $>$ nilai ambang batas yaitu $0.971 > 0.70$ yang menunjukkan bahwa variable tersebut Reliabel. Variabel Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) juga diketahui nilai *Cronbach's Alpha* $>$ nilai ambang batas yaitu $0.966 > 0.70$ yang menunjukkan bahwa variable tersebut Reliabel dan pada variable Efektivitas Pengawasan DPRD (X_3) diketahui nilai *Cronbach's Alpha* $>$ nilai ambang batas yaitu $0.965 > 0.70$ yang menunjukkan bahwa variable tersebut juga Reliabel serta pada variable Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) diketahui nilai *Cronbach's Alpha* $>$ nilai ambang batas yaitu $0.965 > 0.70$ yang menunjukkan bahwa variable tersebut juga Reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dalam penelitian memenuhi syarat statistik sehingga hasil analisis regresi dapat dipercaya dan tidak bias. Dalam penelitian ini digunakan uji multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria yang digunakan menurut Ghozali (2018):

- a. Nilai Tolerance $> 0,10$
- b. Nilai VIF < 10

Jika kedua syarat tersebut terpenuhi maka model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas.

Kriteria Pengambilan Keputusan:

- a. Jika Tolerance > 0.10 dan VIF $< 10 \rightarrow$ tidak terjadi multikolinearitas
- b. Jika Tolerance < 0.10 dan VIF $> 10 \rightarrow$ terjadi multikolinearita

Adapun hasil analisis uji multikolinearitas disajikan pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 5. Hasil Analisis Uji Multikolinearitas.

Variabel	VIF	Tolerance
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.226	0.815
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.201	0.833
Efektivitas Pengawasan DPRD	1.031	0.970

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics

Berdasarkan tabel 5 diatas diketahui bahwa nilai VIF variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) sebesar 1.226, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) sebesar 1.201 dan variable Efektivitas Pengawasan DPRD (X_3) sebesar 1.031. Nilai tolerance variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) sebesar 0.815, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) sebesar 0.833 dan variable Efektivitas

Pengawasan DPRD (X3) sebesar 0.970. Data menunjukkan nilai VIF semua variable < 10 dan nilai Tolerance > 0.10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Adapun Persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 = 4.412 + 0.248 + 0.254 + 0.366$$

Berdasarkan persamaan tersebut diketahui :

- a. nilai a sebesar 4.412 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1), Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) dan Efektivitas Pengawasan DPRD (X_3). Jika variable independen tidak ada maka variable Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak mengalami perubahan.
- b. b_1 (nilai koefisien regresi X_1) sebesar 0.248 menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah maka akan mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.248 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- c. b_2 (nilai koefisien regresi X_2) sebesar 0.254 menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.254 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- d. b_3 (nilai koefisien regresi X_3) sebesar 0.366 menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Pengawasan DPRD mempunyai pengaruh yang positif terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Efektivitas Pengawasan DPRD maka akan mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.366 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Analisis Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel laten. Nilai signifikansi dilihat dari nilai t-statistik (> 1.96 untuk $\alpha = 0.05$) dan nilai p value (< 0.05). Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengujian secara t-statistic (uji t) dan pengujian secara p-value menggunakan (uji p).

Uji t (statistik)

Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji t-statistic adalah sebagai berikut:

- Jika nilai $t > 1,96$, maka hipotesis diterima pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$, two-tailed test).
- Jika nilai $t < 1,96$, maka hipotesis ditolak karena tidak signifikan secara statistik

Tabel 6. Hasil Pengujian Pengaruh Langsung (*Path Coefficients*) T (statistik).

Variabel	T (Statistik)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah → Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.709
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) → Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.705
Efektivitas Pengawasan DPRD → Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.937

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics

Data yang dilihat pada tabel 6 diatas yaitu nilai *t-statistics*. Berdasarkan tabel 6 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- $X_1 \rightarrow Y = t\text{-statistic } 2.709 > 1.96$ (signifikan) dan hipotesis diterima (H_1) Artinya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- $X_2 \rightarrow Y = t\text{-statistic } 2.705 > 1.96$ (signifikan) dan hipotesis diterima (H_2) Artinya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- $X_3 \rightarrow Y = t\text{-statistic } 2.937 > 1.96$ (signifikan) dan hipotesis diterima (H_3) Artinya Efektivitas Pengawasan DPRD berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Uji P (Value)

Adapun kriteria interpretasi *p-value* dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

- Jika $p\text{-value} < 0,05 \rightarrow$ hubungan antar variabel signifikan pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) dan hipotesis diterima.
- Jika $p\text{-value} \geq 0,05 \rightarrow$ hubungan tidak signifikan dan hipotesis ditolak.

Tabel 7. Hasil Pengujian Pengaruh Langsung (*Path Coefficients*) P (Value).

Variabel	P (Value)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah → Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.011
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) → Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.011
Efektivitas Pengawasan DPRD → Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.007

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Statistics

Data yang dilihat pada tabel 7 diatas yaitu nilai P (Value). Berdasarkan tabel 7 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :v

- a. $X_1 \rightarrow Y = P\text{-Value } 0.011 < 0.05$ (signifikan) dan hipotesis diterima (H_1) Artinya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. $X_2 \rightarrow Y = P\text{-Value } 0.011 < 0.05$ (signifikan) dan hipotesis diterima (H_2) Artinya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. $X_3 \rightarrow Y = P\text{-Value } 0.007 < 0.05$ (signifikan) dan hipotesis diterima (H_3) Artinya Efektivitas Pengawasan DPRD berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Uji F (Simultan)

Uji F simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam Uji F simultan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $t > 1,96$, maka hipotesis diterima pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$, two-tailed test).
- b. Jika $p\text{-value} < 0,05 \rightarrow$ hubungan antar variabel signifikan pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) dan hipotesis diterima.

Tabel 8. Hasil Pengujian F (Simultan).

Variabel	T (statistik)	P (Value)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas Pengawasan DPRD $\rightarrow$ Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7.378	0.001

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Statistics

Berdasarkan tabel 8 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. $X_1, X_2, X_3 \rightarrow Y = t\text{-statistic } 7.378 > 1.96$ dan $p\text{-value } 0.001 < 0.05$ (signifikan) dan hipotesis diterima (H_1) Artinya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Efektivitas Pengawasan DPRD berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan nilai t-statistic sebesar 2,709, yang lebih besar dari nilai kritis 1,96, serta nilai p-value sebesar $0,011 < 0,05$. Dengan demikian, H_1 yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hasil ini juga sejalan dengan Mahmudi, (2019) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disusun dalam lingkungan yang memiliki akuntabilitas tinggi cenderung memberikan informasi yang lebih dapat dipercaya karena proses pengelolaan dan pelaporannya dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sejalan pula dengan karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengaruh Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, diketahui bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan nilai t-statistic sebesar $2,705 > 1,96$ dan p-value sebesar $0,011 < 0,05$. Dengan demikian, H_2 yang menyatakan bahwa pengelolaan PAD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik proses perencanaan, pelaksanaan pemungutan, pengawasan, pencapaian target, dan optimalisasi sumber-sumber PAD, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan PAD yang baik memberikan kontribusi terhadap tertibnya administrasi pendapatan daerah sehingga penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD lainnya dapat dicatat, diklasifikasikan, dan dilaporkan secara lebih tepat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Halim (2014) bahwa PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi daerah dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pengelolaan PAD yang dilakukan secara efektif dan efisien akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan. Dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan, proses pengelolaan pendapatan yang tertib akan memberikan dasar informasi yang lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Efektivitas Pengawasan DPRD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, diketahui bahwa efektivitas pengawasan DPRD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan nilai t-statistic sebesar $2,937 > 1,96$ dan p-value sebesar $0,007 < 0,05$. Dengan demikian, H_3 yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin efektif fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan DPRD dalam penelitian ini berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, monitoring program pemerintah daerah, evaluasi penggunaan anggaran, tindak lanjut hasil pengawasan, serta pencegahan penyimpangan anggaran.

Pengawasan DPRD menjadi penting karena DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan APBD. Melalui fungsi tersebut, DPRD dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, mengevaluasi penggunaan anggaran, serta meminta tindak lanjut terhadap berbagai temuan atau penyimpangan yang ditemukan. Pengawasan yang berjalan efektif dapat memberikan tekanan positif kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Mahsun, (2013) yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan sektor publik berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Mahmudi, (2019) juga menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif dapat membantu meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Arifin, (2021) yang dicantumkan dalam artikel Lerni. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Pengawasan yang efektif dapat meminimalkan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga memiliki relevansi dengan penelitian Paramayana *et al.*, (2022) pada DPRD Kota Surakarta. Penelitian tersebut mengkaji penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan pengawasan kualitas laporan keuangan dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian tersebut menempatkan pengawasan sebagai salah satu instrumen yang penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks DPRD Kabupaten Dompu, hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemeriksaan setelah anggaran dilaksanakan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan. Ketika DPRD secara aktif melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penggunaan anggaran, maka potensi kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, maupun penyimpangan pengelolaan keuangan dapat diminimalkan. Kondisi tersebut pada akhirnya mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dengan demikian, efektivitas pengawasan DPRD terbukti menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin optimal fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan, semakin besar peluang terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan PAD, dan Efektivitas Pengawasan DPRD secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan PAD, dan efektivitas pengawasan DPRD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan nilai statistik sebesar 7,378 dengan p-value sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan demikian, H_4 yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan PAD, dan efektivitas pengawasan DPRD secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh satu aspek, tetapi merupakan hasil dari keterkaitan berbagai unsur dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas memberikan dasar pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik, pengelolaan PAD memastikan bahwa sumber-sumber

pendapatan daerah direncanakan dan dikelola secara baik, sedangkan pengawasan DPRD berfungsi memastikan pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Keterkaitan ketiga variabel tersebut dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas membutuhkan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban, pengelolaan PAD membutuhkan pencatatan dan pelaporan yang tertib agar penerimaan daerah dapat diketahui secara jelas, sedangkan pengawasan DPRD membutuhkan laporan keuangan yang relevan dan andal sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut saling mendukung dalam menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang berkualitas akan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, kualitas laporan keuangan pemerintah ditandai dengan karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hasil penelitian ini juga memperoleh dukungan dari penelitian empiris sebelumnya. Penelitian Lestari, (2023) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dengan kontribusi sebesar 69,2%. Penelitian Ferlia *et al.*, (2023) juga menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu, penelitian Bestari dan Wahyuni, (2023) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai determinan dalam proses pengelolaan keuangan, antara lain kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian pada DPRD Kabupaten Dompu memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik, pengelolaan PAD yang optimal, serta pengawasan DPRD yang efektif secara bersama-sama dapat menciptakan proses pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan melalui penguatan ketiga aspek tersebut secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan efektivitas pengawasan DPRD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada DPRD Kabupaten Dompumaka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistic sebesar $2,709 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,011 < 0,05$, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas yang ditunjukkan melalui transparansi pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, ketepatan penyusunan laporan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan keterbukaan informasi publik dapat mendorong tersedianya laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
- b. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistic sebesar $2,705 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,011 < 0,05$, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan PAD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pemungutan, pengawasan, pencapaian target, hingga optimalisasi sumber PAD, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan PAD yang baik dapat mendukung tertibnya administrasi keuangan daerah dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyajian informasi keuangan.
- c. Efektivitas Pengawasan DPRD Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistic sebesar $2,937 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,007 < 0,05$, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin efektif pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dan kebijakan pemerintah daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan melalui monitoring, evaluasi penggunaan anggaran, tindak lanjut hasil pengawasan, dan pencegahan penyimpangan dapat membantu meningkatkan ketertiban dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- d. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan PAD, Dan Efektivitas Pengawasan DPRD Secara Bersama-Sama Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan nilai statistik sebesar 7,378 dengan nilai p-value sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari keterkaitan antara pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan daerah, dan efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Semakin baik ketiga aspek tersebut dilaksanakan secara bersama-sama, maka semakin besar pula peluang terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Bagi DPRD Kabupaten Dompu

DPRD Kabupaten Dompu diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan sebaiknya dilakukan secara lebih aktif dan berkelanjutan, tidak hanya pada tahap evaluasi akhir, tetapi juga melalui monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. DPRD juga perlu memastikan bahwa setiap hasil pengawasan ditindaklanjuti secara jelas agar dapat meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bagi Pemerintah Daerah Dan Pengelola Keuangan

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketepatan pencatatan dan penyusunan laporan, serta keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan hendaknya dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi, dan sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek

penelitian dengan melibatkan lebih banyak perangkat daerah atau pemerintah daerah lain sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan dapat dibandingkan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifin, Zainal. 2021. "Pengaruh Pengawasan DPRD terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2014. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. "Agency Theory: An Assessment and Review." *Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2016. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia *auditing Indonesia*.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2018. "Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*.
- Lane, Jan-Erik. 2005. *Public Administration and Public Management*. London: Routledge.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maria dan Halim. 2021. "Penerapan Agency Theory dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Nordiawan, Deddi. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pramono, Agus. 2020. "Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Priyatno, Duwi. 2016. *Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar. 2017. "Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Suardi dkk. 2024. "Penerapan Agency Theory dalam Governance dan Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- UNDP. 2015. *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Wing Wahyu. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yani, Ahmad. 2017. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zaki dkk. 2023. "Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah dan Akuntabilitas Publik." *Jurnal Akuntansi dan Governance*.